

B u l e t i n



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

KETUA
Sigap Tangani
Korban
Bencana Alam

Harmonisasikan Kurikulum Vokasi Kesehatan

KORKESRA
Evaluasi
Timwas Haji
Akan Dibawa
ke Paripurna

Nomor 1351/II/VII/2025 Juli 2025



9 772614 339005



Harmonisasikan Kurikulum Vokasi Kesehatan



FOTO: MAN/ANA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (4/7/2025).

Komisi IX DPR RI mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi kesehatan dengan roadmap transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (4/7). Pendidikan vokasi dinilai sangat relevan dengan semangat transformasi yang menekankan penguatan layanan primer, promotif, dan preventif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa lulusan Poltekkes tidak hanya dituntut kompetensi teknis semata. Mereka juga harus memahami konteks pelayanan kesehatan di tingkat primer, termasuk di Puskesmas, klinik, dan layanan berbasis komunitas. “Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga

kesehatan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan layanan kesehatan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI, tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga memberikan perhatian terhadap distribusi SDM kesehatan yang belum merata di berbagai

daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan lulusan Poltekkes bisa menjangkau wilayah terpencil dan kekurangan tenaga kesehatan.

Komisi IX berkomitmen mengawal pembahasan kebijakan dan anggaran bersama Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi kurikulum vokasi dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai menyesuaikan beberapa program studi dengan kebutuhan layanan primer. Namun, ia menekankan perlunya dukungan dalam bentuk penguatan sarana, pengembangan alat praktik kompetensi, dan penambahan program studi spesialisasi yang sesuai dengan tren penyakit dan kebutuhan masyarakat.

man/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Sigap Tangani Korban Bencana Alam



FOTO: DOK/PTD

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor. Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

“Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7).

“Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat

pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir mendominasi pada pekan pertama Juli 2025. Misalnya banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sejak Sabtu (5/7) hingga Minggu (6/7).

Akibat bencana banjir, banyak masyarakat di wilayah Jabodetabek terpaksa harus mengungsi karena rumahnya terendam air yang cukup tinggi. Bahkan ada juga rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir. aha



Buletin
PARLEMENTARIA

HARMONISASIKAN KURIKULUM VOKASI KESEHATAN

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analitis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizat, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Insan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Evaluasi Timwas Haji Akan Dibawa ke Paripurna

Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa hasil pengawasan haji 2025 yang telah dirangkum dalam *executive summary* akan segera dilaporkan ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI dan dilanjutkan ke Rapat Paripurna. Ia menegaskan bahwa laporan Timwas tersebut berpotensi dilanjutkan ke tahapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji apabila dinilai perlu pendalaman lebih lanjut.

"Kita perlu telusuri penyebab berbagai persoalan haji yang terjadi,

apakah cukup melalui perbaikan teknis, regulasi, atau memang butuh pendalaman lebih jauh," ujar Cucun kepada **Parlementaria** usai rapat internal evaluasi Timwas Haji di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Cucun menambahkan, sesuai mekanisme di DPR RI, laporan Timwas Haji akan terlebih dahulu dibawa ke Rapat Pimpinan sebelum dipresentasikan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dari situ, laporan pengawasan haji tersebut akan ditetapkan sebagai dokumen negara.

Kita perlu telusuri penyebab berbagai persoalan haji yang terjadi, apakah cukup melalui perbaikan teknis, regulasi, atau memang butuh pendalaman lebih jauh

"Kalau memang kesimpulan dari rapat nanti menyatakan perlu dilanjutkan lewat mekanisme Pansus, maka kita akan bentuk Pansus Haji. Seperti sebelumnya pernah lewat Panja Komisi VIII, sekarang kita terbuka terhadap opsi pembentukan Pansus," jelas Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan Timwas akan menjadi pijakan penting dalam menyiapkan pelaksanaan haji tahun-tahun mendatang, khususnya jelang peralihan wewenang penyelenggaraan haji yang akan dijalankan oleh lembaga baru.

Ia menutup pernyataannya dengan komitmen DPR RI untuk terus mengawal transformasi tata kelola haji agar lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada jemaah. **rdn**

Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat internal evaluasi Timwas Haji di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya





Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat bertukar cinderamata usai pertemuan kunjungan kerja spesifik ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung.

Tinjau Kesiapan Pembangunan Kodam Baru

Rombongan Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Korem 043/Garuda Hitam di Provinsi Lampung. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dalam rangka meninjau kesiapan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang direncanakan mencakup wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu.

Dalam pernyataannya, Dave Laksono menjelaskan bahwa pembangunan Kodam merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pertahanan,

sebagaimana telah digariskan oleh Presiden RI dalam kerangka pembangunan pertahanan negara yang masif dan terintegrasi.

“Untuk memastikan target-target pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik nasional, dan penguatan kekuatan pertahanan negara. Maka itu dibutuhkan pembentukan Kodam-Kodam di seluruh Indonesia,” ujar Dave, Jumat (4/7).

Untuk tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan lima Kodam baru pada tahun ini, dan salah satunya akan dibangun di Lampung. Namun, setelah mempertimbangkan

kondisi ekonomi nasional dan ketersediaan anggaran dalam APBN, pembangunan lima Kodam tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam proses pembangunan, terutama terkait pendanaan dan penyediaan lahan. Kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam pertemuan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung program strategis ini.

Lebih lanjut, Komisi I menekankan pentingnya pembangunan Kodam yang tidak hanya berorientasi pada aspek militer, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

“Kehadiran personel TNI dalam struktur Kodam nantinya harus memiliki fungsi yang nyata dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat,” tutup Dave.

gys/aha



Harmonisasikan Kurikulum Vokasi Kesehatan

Komisi IX DPR RI mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi kesehatan dengan roadmap transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Poltekkes Kemenkes Palembang, Kamis (4/7). Pendidikan vokasi dinilai sangat relevan dengan semangat transformasi yang menekankan penguatan layanan primer, promotif, dan preventif.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa lulusan Poltekkes tidak hanya dituntut kompetensi teknis semata. Mereka juga harus memahami konteks pelayanan kesehatan di tingkat primer, termasuk di

Puskesmas, klinik, dan layanan berbasis komunitas. “Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga kesehatan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan layanan kesehatan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI, tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga memberikan perhatian terhadap distribusi SDM kesehatan yang belum merata di berbagai daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memastikan lulusan Poltekkes bisa menjangkau wilayah terpencil dan kekurangan tenaga kesehatan.

Komisi IX berkomitmen mengawal pembahasan kebijakan dan anggaran bersama

Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi kurikulum vokasi dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Poltekkes Palembang, Muhamad Taswin, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai menyesuaikan beberapa program studi dengan kebutuhan layanan primer.

Namun, ia menekankan perlunya dukungan dalam bentuk penguatan sarana, pengembangan alat praktik kompetensi, dan penambahan program studi spesialisasi yang sesuai dengan tren penyakit dan kebutuhan masyarakat.

man/rdn

Kami berharap Poltekkes mampu mencetak tenaga kesehatan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan layanan kesehatan masa depan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kanwil BPN Sumbar), Kamis (3/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: QQ/PDT

Babak Baru KUHAP



Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman menerima DIM RUU KUHAP dari Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Komisi III DPR RI, pada Selasa (8/7), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, untuk selanjutnya akan dibahas bersama di DPR RI.

RUU KUHAP ini dijelaskan Ketua Komisi III, Habiburrahman, sebagai langkah signifikan menuju peradilan pidana terpadu yang profesional dan akuntabel, menjawab kebutuhan mendesak akan modernisasi hukum setelah

KUHAP yang lama berlaku lebih dari 44 tahun sejak tahun 1981.

Penyempurnaan KUHAP secara komprehensif ini didasari oleh berbagai dinamika hukum dan sosial, termasuk perubahan undang-undang, konvensi internasional, putusan Mahkamah Konstitusi, serta modernisasi teknik dan sistem pembuktian. Salah satu dorongan terbesar adalah ketidakmampuan KUHAP lama dalam memberikan perlindungan memadai kepada warga negara dan kecenderungannya pada pembedaan retributif.

“Kasus-kasus seperti Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakao, pencurian kayu jati di Bojonegoro, atau pencurian sandal jepit,

menunjukkan bagaimana KUHAP yang berlaku saat ini mengharuskan proses hukum, padahal hati nurani menolak,” demikian Habib mengilustrasikan kebutuhan akan keadilan restoratif sebagai solusi untuk kasus-kasus ringan.

Selain itu, Habib menjelaskan bahwa RUU KUHAP juga berupaya mengatasi minimnya peran advokat dalam mendampingi warga negara yang berhadapan dengan hukum, serta maraknya intimidasi dan pelanggaran selama proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan ini diharapkan menjadikan aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.

— bia



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Keselarasan Program Wujudkan Swasembada Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2026 sebesar Rp44,64 triliun, yang naik dari rencana awal yakni, Rp13,75 triliun. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian pada Senin (7/7)

Merespons itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra menyatakan dukungan penuh pihaknya terhadap cita-cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun demikian, menurutnya, keberhasilan itu sangat bergantung pada konsistensi kebijakan anggaran.

“Untuk mencapai itu, tentu salah satu indikasinya adalah politik anggaran,” ujar Alex.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara target produksi yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan target yang disusun oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Ini memang agak mengejutkan ya, bahwa ada perbedaan target sebenarnya. Untuk target produksi padi contohnya, Bappenas itu menargetkan 54,85 juta ton untuk tahun 2026, sementara target dari Kementan sendiri itu adalah 33,8 juta ton,” jelasnya.

Menurut Alex, selisih target itu tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai. Maka dari itu, ia mendorong agar kementerian terkait segera melakukan konsolidasi.

“Silakan pemerintah untuk berkonsolidasi, target mana yang mau dipakai. Dan tentu target ini harus didukung oleh anggaran. Kalau nggak, ya percuma kita bicara,” imbuhnya. — **hal/rdn**



Tol yang Tak Layak, Ekonomi Terganggu

Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengingatkan pemerintah melalui Kementerian PU bahwa buruknya kualitas ruas Tol Palembang - Kayu Agung bukan hanya

penggerak utama mobilitas barang dan orang antardaerah. Namun, jika kualitasnya jauh dari standar, terangya, maka fungsi vital jalan tol sebagai tulang punggung distribusi ekonomi akan terganggu.

“Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau jalan tol

jalan tol yang ada di Indonesia. Dirinya menyebut banyak titik jalan bergelombang, rambu yang tidak memadai, hingga desain tikungan yang berbahaya.

Oleh karena itu, Syarif meminta Kementerian PU dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tidak hanya terpaku pada pembangunan jalan tol di Jawa. Ia mengingatkan pembangunan infrastruktur harus merata dan memperhatikan kondisi tanah setempat.

Terakhir, ia menekankan Komisi V DPR RI berjanji akan terus mengawal agar pembangunan dan



Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025).

merugikan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7).

Menurut Syarif, infrastruktur jalan tol semestinya menjadi

yang mestinya mempercepat distribusi barang, justru jalannya bergelombang, rawan kecelakaan, dan tidak nyaman dilalui?” tegasnya kepada Parlementaria.

Lebih lanjut, ia juga mengamati langsung kondisi ruas Tol Palembang– Kayu Agung yang memprihatinkan di antara sejumlah

perawatan jalan tol di luar Jawa supaya mendapat perhatian yang sama seriusnya. “Jangan sampai kualitas rendah ini terus dibiarkan, lalu daerah yang jadi korban karena pertumbuhan ekonominya terhambat akibat akses distribusi yang buruk,” pungkas Syarif.

um/rdn



Desak Telkom Akumulasi Sisa Data

Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyoroti praktik hangusnya sisa kuota internet yang masih marak diterapkan operator telekomunikasi di Indonesia. Ia meminta agar seluruh penyedia layanan telekomunikasi lainnya, dapat menerapkan sistem akumulasi kuota sehingga tidak merugikan konsumen.

"Pak Menteri, ini masyarakat juga banyak bertanya-tanya. Waktu rapat dengan Telkom, saya sudah sampaikan bahwa setiap pembelian kuota itu kan mesti ada sisa pada saat masa tenggangnya habis. Nah, yang terjadi di sini sisa kuota itu selalu hangus," kata Sadarestuwati dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Dirinya menyampaikan bahwa praktik hangusnya kuota internet ini telah menyasar jutaan pengguna di Indonesia. Sebagai contoh, jika satu nomor rata-rata memiliki sisa 20 GB kuota data saat masa aktif berakhir, maka potensi data yang hangus

Telkomsel dan operator lainnya mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan mengakumulasi sisa kuota ke periode berikutnya saat pelanggan melakukan isi ulang.

akan sangat besar ketika dikalikan dengan jumlah pengguna aktif.

"Kalau kita hitung, satu pengguna katakanlah satu nomor bisa minimal sisa 20 giga. Dikalikan berapa juta pengguna telepon genggam ini? Saya baca sekitar 137 juta masyarakat kita menggunakan gadget. Ini kan potensi kerugian yang luar biasa bagi konsumen," tegasnya.

Sadarestuwati mendorong agar Telkomsel dan operator lainnya mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan mengakumulasi sisa kuota ke periode berikutnya saat pelanggan melakukan isi ulang. Menurutnya, langkah ini penting sebagai wujud perlindungan konsumen dan pelayanan yang lebih adil.

Di sisi lain, Sadarestuwati juga mengingatkan Kementerian BUMN untuk terus mendorong BUMN sektor Telekomunikasi agar lebih responsif terhadap keluhan publik.

um/aha

Anggota Komisi VI DPR RI
Sadarestuwati saat Rapat Kerja dengan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia Erick Thohir di
Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,
Rabu (8/7/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: FHN/PDT

Susun Regulasi AI demi Proteksi Tenaga Kerja

Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot mendesak pemerintah untuk segera menyusun regulasi dan pedoman tata kelola kecerdasan artifisial (*AI Governance Guidelines*) yang menyeluruh. Baginya, upaya ini harus diusahakan sebab dirinya tidak ingin Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan juga harus bisa menjadi pelaku utama dalam transformasi digital global.

“Kesadaran akan kebangkitan kecerdasan artifisial ini harus menjadi milik bersama. Ini bukan hanya isu teknologi, tetapi juga isu kebijakan, ketenagakerjaan, dan keadilan ekonomi,” ujar

Banyu dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Di sisi lain, ia menyampaikan keprihatinan atas minimnya kesadaran strategis terhadap dampak jangka panjang AI terhadap sektor industri dan tenaga kerja

nasional. Perlu diketahui, AI kini tidak lagi terbatas pada sektor teknologi tinggi, namun telah menyusup ke seluruh lini industri seperti komunikasi, keuangan, pertambangan, kesehatan, hingga pertanian.

Menurutnya, tanpa pengawasan yang memadai, AI berpotensi menimbulkan disrupsi serius terhadap lapangan kerja konvensional.

Lebih lanjut, Banyu menekankan pentingnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri digital, dan mendorong pembuat kebijakan untuk memantau perkembangan teknologi secara aktif dan adaptif. Dirinya juga mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Perindustrian merancang kebijakan transisi kerja bagi sektor-sektor yang paling rentan terdampak otomatisasi.

— **um/aha**

Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

FOTO: FHN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tambahan Anggaran 1,19 T Sekolah Rakyat



FOTO: AFR/PDT

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,19 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemensos) guna mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat tahap pertama. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/7), yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Dalam pembukaannya, Marwan menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran Kemensos mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/

MK.02/2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Namun, efisiensi tersebut tidak menyasar belanja pegawai maupun bantuan sosial.

“Komisi VIII sepakat bahwa efisiensi anggaran jangan sampai memengaruhi belanja strategis, apalagi yang menyangkut kesejahteraan langsung masyarakat. Karena itu, kami mendukung penambahan anggaran untuk program Sekolah Rakyat yang menyasar pendidikan kelompok rentan,” ujar Marwan.

Dengan efisiensi tersebut, pagu anggaran Kemensos yang semula Rp79 triliun direvisi menjadi Rp78 triliun. Namun setelah penambahan dana untuk Sekolah Rakyat, total

anggaran Kemensos kembali naik menjadi Rp79,19 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa anggaran Sekolah Rakyat telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. “Alhamdulillah, usulan kami untuk Sekolah Rakyat telah dibahas dan disetujui. Komisi VIII pun telah menyetujui dalam rapat ini,” ujar Gus Ipul.

Adapun pada tahap pertama Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di 100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan 63 lokasi telah siap beroperasi dan 37 lainnya masih dalam proses finalisasi renovasi. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli 2025.

ssb/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kemnaker Perlu Sesuaikan Kurikulum

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya revitalisasi menyeluruh terhadap Balai Latihan Kerja (BLK), baik dari sisi infrastruktur maupun kapasitas instruktur. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Menurut Putih Sari, persoalan minimnya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri masih menjadi tantangan klasik yang belum terselesaikan. Ia menilai perlu adanya jaminan

dari Kementerian Ketenagakerjaan agar setiap pelatihan benar-benar berbasis kebutuhan lokal dan strategis nasional.

"Kementerian perlu memastikan bahwa setiap pelatihan di BLK benar-benar berbasis *project-based learning*, sehingga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan industri strategis nasional," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia menyoroti keterbatasan tempat uji kompetensi dan jumlah asesor di berbagai daerah yang menyebabkan banyak peserta pelatihan harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh sertifikasi.

"Banyak peserta yang mau tidak mau akhirnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu

Kementerian perlu memastikan bahwa setiap pelatihan di BLK benar-benar berbasis *project-based learning*, sehingga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan industri strategis nasional

'lompat' provinsi gitu ya. BLK-nya di mana untuk bisa mendapatkan sertifikasinya harus ke provinsi yang lain kan, ini pasti secara biaya juga menjadi tinggi," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pelatihan instruktur melalui program Training of Trainers (ToT) kepada 280 instruktur, khususnya di bidang Smart Operation dan Smart Creative IT Skills. Pelatihan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus menarik minat generasi muda. — **clr,rnm/rdn**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: EOT/PDT



FOTO: MRO/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Komisi X Setujui Tambahan Anggaran 2026 Kemendikdasmen Sebesar Rp71 Triliun

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya menyetujui tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar RP 71,11 triliun. Menurutny,

tambahan anggaran tersebut sangat krusial mengingat digunakan untuk program wajib belajar 13 tahun.

"Komisi X menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2026 Kemendikdasmen Rp 67,672 triliun, dan menyetujui usulan tambahan pagu indikatif RAPBN TA 2026 Rp 3,439 triliun sehingga

totalnya 71,11", ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti mengapresiasi program wajib belajar 13 tahun. Ia meminta Kemendikdasmen menyiapkan anggaran untuk menindaklanjuti amanat putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan tanpa pungutan biaya yang harus dilakukan secara bertahap mulai TA 2026.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengucapkan terimakasih kepada Komisi X yang telah menyetujui tambahan anggaran Kemendikdasmen TA 2026 sebesar Rp 71,11 triliun.

"Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI dan kami harapkan kedepannya kita dapat terus berkomunikasi agar tambahan anggaran ini berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya," imbuhnya. **tn/rdn**



Pemerintah Sepakati Tambahan Penerimaan Lewat Bea Keluar Emas dan Batu Bara

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK di Jakarta, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Saat ini produk emas mentah atau dore bullion sudah dikenai bea keluar sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/2024. Namun, emas batangan dan perhiasan belum termasuk dalam objek tersebut. Sementara, batubara tak lagi dikenai bea keluar sejak 2006 dan hanya dikenakan royalti sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi H Amro menjelaskan bahwa untuk besaran tarif bea keluar nantinya akan diusulkan oleh Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kementerian Keuangan untuk diterbitkan dalam bentuk PMK.

“Harapan kita (bea keluar) sebagai penerimaan negara yang baru itu akan naik. Jadi kita memang ingin mempertegas bahwa tarifnya ditentukan oleh Kementerian ESDM. Lewat ESDM nanti ke PMK,” jelas Fauzi pada *Parlementaria* usai rapat.

Selain bea keluar emas dan batu bara, DPR juga mendorong pemerintah memperluas basis penerimaan negara melalui ekstensifikasi barang kena cukai baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). — **we/rdn**

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi H Amro saat rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (7/7/2025).



Bekerja Keras Tingkatkan Lifting Migas

Perlunya peningkatan kinerja lifting minyak dan gas bumi nasional serta percepatan reformasi regulasi sektor hulu energi demi mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional menjadi sorotan utama Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian.

“Tetapi sudah saya lihat sekarang di sini bahwa proyeksi atau target untuk 2026 berkisar di 600 ke 610. Jadi saya mengharapkan agar Kementerian ESDM dan SKK Migas kerja keras agar bisa meningkat dari 610 ribu barel per hari lifting ini, jadi apapun caranya,” ujar Ramson saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, BPH Migas, dan Direktur Utama Pertamina, yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung

Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Ramson menyoroti kendala birokrasi yang masih berbelit dalam proses eksplorasi migas, termasuk di Pertamina yang menyumbang lebih dari 60% lifting minyak nasional.

“Di Pertamina yang sekitar 60% lifting minyak kita dari Pertamina, untuk eksplorasi birokrasinya juga masih panjang. Sudah diketemukan data cadangan minyak, tetapi untuk kalau mulai mau eksplorasi, itu sampai mulai dan baru ada seismiknya itu lama prosesnya, bisa 2 tahun coba,” tandasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mendorong revisi terhadap UU Migas agar hambatan regulasi dan birokrasi dapat disederhanakan. Menurut Ramson, inisiatif revisi UU Migas sebaiknya berasal dari Pemerintah agar lebih sesuai

dengan visi Presiden.

“Jadi mesti lembur juga ini dari Pemerintah untuk mengajukan RUU Migas kepada DPR RI. Kalau nanti, karena sudah sejak 2012, sejak ada keputusan MK, belum jadi direvisi ini Undang-Undang Migas. Jadi lebih bagus dari pemerintah supaya menyesuaikan dan minta arahan Bapak Presiden sesuai dengan visi Beliau, jadi dijabarkan langsung,” tutur Ramson.

Di sisi lain, Ramson juga meminta perhatian terhadap peningkatan volume subsidi dan distribusi LPG bagi masyarakat kecil. Ia mengusulkan agar volume LPG tahun 2026 bisa ditingkatkan menjadi sekitar 8,5 hingga 8,6 juta metrik ton, mengingat tingginya permintaan di lapangan terlebih fakta bahwa permintaan dari masyarakat kecil masih banyak.

pun/aha



FOTO: MRP/PDT

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, BPH Migas, dan Direktur Utama Pertamina, di Ruang Rapat Komisi XII, Senin (30/6/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Usul Sertifikasi HAM untuk Perusahaan

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap persoalan HAM di Provinsi Riau. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembentukan Kantor Wilayah HAM di provinsi tersebut untuk menangani tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi.

“Riau dari jumlah penduduk dan jumlah kasus HAM-nya sangat tinggi, tapi belum ada Kanwil HAM,” tegas Siti Aisyah dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Kementerian

HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia juga menyoroti lemahnya kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) HAM yang saat ini bertugas di daerah. Menurutnya, UPT tidak memiliki posisi setara saat menghadapi institusi penegak hukum seperti kepolisian.

“Jadi kalau UPT yang datang, berhadapan duduk dengan Polda tidak ada hak bicara. Jadi kasihan UPT kita yang ada di daerah yang hari ini di Riau banyak

kasus-kasus HAM,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Legislator dari Riau II itu juga menyinggung kasus Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada puluhan ribu warga. Ia menilai kebijakan penetapan kawasan tersebut tidak mempertimbangkan nasib masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup di sana.

Menurutnya, KemenHAM sebagai institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM, seharusnya berpihak kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar kementerian tidak hanya sekadar

Riau dari jumlah penduduk dan jumlah kasus HAM-nya sangat tinggi, tapi belum ada Kanwil HAM

menyetujui kebijakan pemerintah pusat.

“Jadi sebagai Menteri HAM harusnya kita berpihak ke masyarakat, bukan harus mengiyakan apa kata pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat HAM. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi mekanisme kontrol sekaligus sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Setiap perusahaan badan harusnya punya sertifikat HAM,” usulnya.

Jika perusahaan terbukti melanggar HAM, menurutnya, sertifikat tersebut harus dicabut sebagai bentuk sanksi.

Langkah ini dinilai perlu agar komitmen terhadap HAM dapat ditegakkan secara nyata. [gal/rdn](#)

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO : RSB/PDT

Ada 441 Indikator Tanpa Penanggung Jawab Jelas



FOTO: ATA/PDT

Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Ia pun menyoroti soal ketidaktertiban data dalam dokumen RKP, yang mana memuat 441 indikator dan sasaran, namun tidak tercantum kementerian atau lembaga penanggung jawab.

"Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Ini menyulitkan pengawasan dan evaluasi DPR," tutur Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/

Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Delapan program prioritas nasional yang disebut Menteri PPN sudah tercantum lengkap dalam dokumen sesuai Permen PPN Nomor 3 Tahun 2025. Akan tetapi, ia menyayangkan dari total 441 indikator yang tersebar dalam delapan prioritas tersebut, belum ada yang menunjukkan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya, atau dari mana anggaran pelaksanaannya berasal.

"Indeks ketahanan energi misalnya, ditargetkan 6,82 di tahun 2026. Tapi tidak jelas kementerian

mana yang menjalankannya, programnya apa, dan anggarannya berapa," ujarnya.

Dalam konteks pengawasan anggaran terutama dari sisi parlemen kelengkapan data terutama data penanggung jawab program, rincian program kerja, dan estimasi alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga memainkan peran yang krusial.

"Kalau tidak dilengkapi, kami kesulitan mengaitkan antara sasaran, pelaksana, dan anggarannya. Evaluasi menjadi tidak objektif," tegas Dolfie.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta Bappenas segera melengkapi dokumen RKP dengan menyajikan data pemetaan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait

Kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana

supaya pembahasan panitia kerja (panja) berjalan lebih efektif.

Menutup pernyataannya, Dolfie menekankan masukan ini adalah upaya DPR melalui Banggar DPR RI untuk mendorong perencanaan anggaran yang lebih transparan, berbasis kinerja, dan terukur. Harapannya, pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, namun juga bisa memastikan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab mengeksekusi dengan kejelasan dukungan sumber daya. **um/aha**



Nongsa Digital Park Jadi Contoh Pengembangan SDM Digital



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga saat memimpin Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional dari BKSAP DPR RI meninjau langsung kawasan NDP di Batam, Rabu (2/7/2025).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengapresiasi peran Nongsa Digital Park (NDP) sebagai pusat ekonomi digital dan pengembangan SDM muda Indonesia. Hal ini diungkapnya usai memimpin Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional dari BKSAP DPR RI meninjau langsung kawasan NDP di Batam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja mendukung proses akses Indonesia ke OECD dan peningkatan tata kelola sektor digital.

“Jadi di Nongsa Digital Park itu banyak menjadi, memproduksi banyak konten-konten IP

(intellectual property) yang sudah terkenal di dunia. Seperti Bitter Rabbit, Coco Melon, dan sebagainya. Banyak outsourcing juga di sini, dan mereka juga

menciptakan IP sendiri,” ujar Ravindra di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/7).

Menurut Ravindra, salah satu kekuatan utama Nongsa Digital Park adalah model pelatihan kerja yang fokus dan terarah bagi generasi muda. Ia mencatat bahwa anak-anak muda lulusan SMA, mulai usia 18 tahun, dapat mengikuti pelatihan di Apple Developer Academy maupun lembaga pelatihan digital lainnya di kawasan tersebut.

“Yang menarik lagi Nongsa Digital Park ini memiliki model fokus yang luar biasa. Jadi banyak anak 18 tahun yang baru lulus misalnya, bisa mendapatkan training di Apple Academy dan juga dan sebagainya untuk misalnya melakukan UI, UX, full stack web design, dan sebagainya. Kemudian tingkat penyerapan kerjanya setelah 10 bulan pelatihan itu sekitar 80%,” tambahnya.

Lulusan pelatihan ini banyak yang bekerja di sektor-sektor strategis seperti pengembangan web penuh waktu (full-time web development) dan animasi. Menurut Ravindra, model pelatihan dan penyerapan seperti ini sangat relevan untuk menghadapi kebutuhan industri digital global, serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan pengembangan SDM yang menjadi perhatian OECD. **nap/aha**



FOTO: NAP/PDT



Efisiensi Susun RUU Pengaturan Ruang Udara

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengusulkan kebijakan efisiensi waktu penerbangan sipil agar diatur dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara. Ia menjelaskan usulan ini disampaikan demi mempermudah pengaturan lalu lintas sekaligus kinerja Airnav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi udara Indonesia.

“Daerah yang tidak bisa dilewati pesawat sudah sangat mengganggu lalu lintas penerbangan sipil, apalagi nantinya akan ditambahkan dalam undang-undang ini. Maka ruang udara akan menjadi penuh dan menambah pekerjaan bagi Airnav untuk menghindari daerah tertentu,” ujar Yasti dalam Rapat Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara bersama Airnav Indonesia di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (2/7).

Ia berharap agar daerah yang memiliki keterbatasan akses penerbangan langsung (direct flight) ini nantinya bisa ditambahkan kuota rute pesawat supaya waktu terbang menjadi lebih efisien, khususnya penerbangan sipil. “(seperti yang dijelaskan) Lion Air menjelaskan bahwa untuk terbang dari Cengkareng ke Makassar, harus memutar ke Semarang dulu baru direct ke arah Makassar,” jelasnya.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, dirinya juga berharap adanya masukan dari Airnav Indonesia sebagai pengelola navigasi udara Indonesia supaya bisa

memberikan gambaran yang lebih detail dengan mengedepankan prinsip efisien dalam penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini. “Sebagai penyedia layanan navigasi

Daerah yang tidak bisa dilewati pesawat sudah sangat mengganggu lalu lintas penerbangan sipil, apalagi nantinya akan ditambahkan dalam undang-undang ini

penerbangan, Airnav seharusnya mengetahui rute-rute udara yang tidak ekonomis. Kalau bisa diefisienkan, ada di wilayah mana saja dan bagaimana perlakuan Airnav supaya bisa efisien?” tanyanya kepada Dirut Airnav, Capt. Avirianto Suratno.

Terakhir, dengan adanya RUU Pengelolaan Ruang Udara, Yasti ingin implementasi kebijakan pengelolaan navigasi udara dapat mengakomodir setiap keluhan stakeholder penerbangan sipil sekaligus menjaga kedaulatan di wilayah udara Indonesia melalui kerjasama dengan TNI AU. 
cpp,um/aha



Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow saat Rapat Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara bersama Airnav Indonesia di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (2/7/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Himpun Masukan Terkait Pendidikan Gratis



Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan saat memimpin kunjungan kerja BAM DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jateng, Senin (7/7/2025).

Dalam rangka menyerap aspirasi kesiapan daerah dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pendidikan adalah untuk semua warga negara. Dalam hal ini menurutnya warga negara berhak mendapat perlindungan konstitusional dalam mengakses pendidikan yang setara, adil, dan tidak diskriminatif.

“Pada dasarnya kita menyepakati ‘Education for all’, pendidikan berlaku untuk semua warga negara. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Semua warga harus mendapatkan hak pendidikannya, sehingga ke depan kita rancang bersama-sama untuk tidak ada yang tidak

bersekolah, semua harus sekolah,” ungkap Aher usai memimpin kunjungan kerja BAM DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jateng, Senin (7/7).

Politisi fraksi PKS ini turut mengapresiasi pemerintah provinsi Jateng yang sudah mengimplementasikan akses pendidikan gratis di tingkat SMA,

SMK, dan SLB Negeri dengan pembiayaan ditanggung melalui dana BOS (APBN) dan BOS Pendidikan (APBD Provinsi).

Secara teknis provinsi Jateng sudah mengimplementasikan dengan baik tentu kebaikan tidak ada yang sempurna maka tetap harus ditingkatkan. Secara umum kami apresiasi Pemprov Jateng karena sudah mulai menggratiskan pendidikan secara bertahap,” pungkas Aher.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyambut baik implementasi putusan MK terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Meski demikian implementasi keputusan MK tersebut membutuhkan tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret.

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan uji materi Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya, merupakan tonggak penting dalam sejarah penjaminan hak atas pendidikan yang inklusif. Melalui putusan ini, warga negara mendapat perlindungan atas hak konstitusional dalam mengakses pendidikan yang setara, adil, dan tidak diskriminatif. —tra/aha



Sekjen DPR Lantik Pejabat Baru

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rabu (9/7/2025) di Gedung Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pelantikan ini juga, secara resmi Inosentius Samsul, yang akrab disapa Sensi, tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI dan kini menjadi Perancang Perundang-Undangan Ahli Utama.

Indra Iskandar menyampaikan bahwa pelantikan ini mencakup sejumlah jabatan strategis, seperti Kepala Pusat Teknologi dan Informasi yang kini dijabat oleh Erdinal Hendradjaja, serta Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yang kini dijabat Wiwin Sri Rahyani.

"Lini-lini ini menjadi sangat strategis ke depan untuk mendukung parlemen modern. Salah satunya adalah memperkuat sarana kerja digital. Kita perlahan

harus tinggalkan cara kerja manual, terutama yang berbasis kertas," ujar Indra pada *Parlementaria*.

Ia menekankan bahwa berbagai agenda rapat dan persidangan di DPR RI saat ini sudah mulai beralih ke format digital, dan hal tersebut akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Dalam hal perancangan perundang-undangan, lanjut Indra, peran teknologi informasi menjadi sangat penting mengingat tingginya sensitivitas dan perhatian publik terhadap proses legislasi.

Terkait kekosongan jabatan Kepala Badan Keahlian, Indra menyebutkan bahwa proses seleksi untuk mengisi posisi tersebut, serta posisi Deputy Administrasi, masih terus berjalan. Ia berharap pengisian jabatan tersebut tidak akan memakan waktu lama. **we/aha**



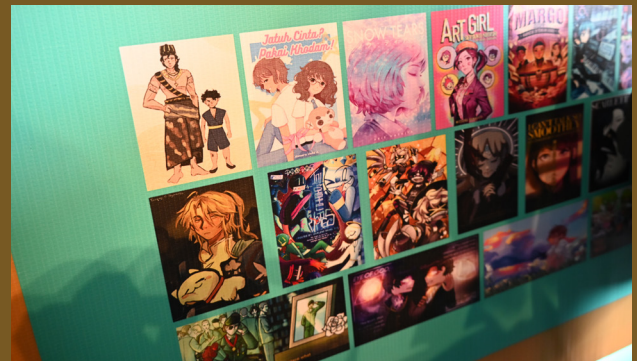
FOTO:RSB/IDT

Foto bersama usai pelantikan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rabu (9/7/2025) di Gedung Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.





**Wakil Ketua Komisi VII
DPR RI Rahayu Saraswati
Djojohadikusumo bersama jajaran
melakukan kunjungan kerja ke
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Singhasari, Malang, Jawa Timur,
Selasa (15/7/2025). Peran KEK
Singhasari Dapat Dioptimalkan
sebagai simpul strategis
pengembangan ekonomi digital
nasional yang terintegrasi dengan
jaringan global.**





Podcast.

「SUDUT DENGAR PARLEMEN」



@TVRPARLEMEN



RADIO PARLEMEN



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri